

Pelaksanaan Etika Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Rini Irianti Sundry

Fakultas Hukum Unisba
E-mail: riniirianti@yahoo.co.id

Abstrak. Penyimpangan etika banyak terjadi dalam setiap era pemerintahan, terlebih pada era reformasi saat ini. Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diwujudkan melalui fungsi pokok pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pengembangan etika pemerintahan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi sejauh ini belum banyak usaha dilakukan untuk mengembangkannya. Tulisan ini dimaksudkan sebagai bentuk pengembangan etika birokrasi dengan cara menganalisis tentang pentingnya etika birokrasi yang merupakan tuntutan dan harus sesegera mungkin dilakukan. Hal tersebut sangat terkait dengan tuntutan tugas dari aparat birokrasi, agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat yang dilayani, diatur dan diberdayakan. Pada akhirnya, etika birokrasi sangat penting untuk diperhatikan dalam pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel karena etika birokrasi dapat dikatakan merupakan suatu ukuran dan sistem sensor untuk melihat kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, melihat dimensi normatif dan reflektif setiap aparat dalam menjalankan tugas yang adil dan berfokus kepada pelayanan kepentingan publik.

Kata Kunci : Etika, Birokrasi, Pemerintahan, publik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kehidupan kenegaraan modern, birokrasi adalah salah satu pilar yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, yakni sebagai sarana untuk pencapaian cita-cita ideal suatu bangsa dan negara dalam upaya menyelenggarakan kesejahteraan masyarakatnya.

Birokrasi idealnya bertugas menghubungkan kepentingan negara dan masyarakat dengan satu komitmen pelayanan yang terus meningkat dari waktu ke waktu (Adig Suwandi: 2004:21). Terlebih lagi dalam situasi dan kondisi masyarakat yang mulai memiliki sikap kritis dan tuntutan global, maka tidak bisa tidak, birokrasi harus dapat melakukan peran dan fungsinya secara maksimal untuk tujuan akhirnya mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Era reformasi saat ini, banyak terjadi penyimpangan pada tubuh birokrasi baik penyimpangan dalam bentuk “korupsi, kolusi, maupun nepotisme” (KKN). Hal ini dapat terjadi berkaitan dengan etika. Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Berbicara tentang Etika Birokrasi artinya berbicara tentang bagaimana aparat Birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk dilakukan dan yang sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dilaksanakan.